

## BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1 Kesimpulan

Dari hasil analisis penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang dapat disimpulkan bahwa secara umum penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) pada Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang belum optimal, dengan beberapa ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya. Masalah utama meliputi ketidakkonsistenan pengawasan penggunaan APD, ketidakcocokan kompetensi tenaga kerja K3, serta lemahnya sistem pelaporan kecelakaan, sanksi, dan tindak lanjut audit internal. Ketidaksesuaian ini dapat dikategorikan dalam beberapa komponen utama sebagai berikut:

#### 1. Komponen Input:

##### a. SDM

Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang menghadapi ketidaksesuaian dalam penerapan standar kompetensi K3, terutama terkait keberadaan tenaga K3 yang belum tersertifikasi, termasuk penempatan tenaga K3 bersertifikasi Ahli K3 Muda sebagai sekretaris P2K3, yang seharusnya diisi oleh Ahli K3 Umum. Ketidaksesuaian ini bertentangan dengan peraturan seperti PER.04/MEN/1987, PP No. 50 Tahun 2012, dan Keputusan Dirjen No. 20/DJPPK/VI/2004, yang mensyaratkan tenaga K3 berkompeten sesuai standar. Selain itu, tidak adanya Ahli Utama dan Ahli Madya K3 Konstruksi sesuai regulasi.

##### b. Sarana dan Prasarana

Meskipun Proyek Pembangunan Pasar Raya Kota Padang telah berupaya memenuhi standar keselamatan kerja dengan menyediakan APD, kotak P3K,

APAR, dan rambu-rambu keselamatan, masih terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Masalah utama terletak pada ketidaktepatan pemberian APD kepada tamu yang berkunjung dan ketidaksempurnaan kelengkapan kotak P3K, yang berpotensi meningkatkan risiko keselamatan di lokasi proyek.

c. Mesin dan Alat

Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang telah menerapkan pengendalian risiko melalui HIRADC, JSA, dan TBM, serta pengecekan alat berat. Namun, potensi bahaya terkait alat berat, pekerjaan di ketinggian, dan kelistrikan masih signifikan. Ketidaksesuaian prosedur keselamatan dengan regulasi dan kurangnya pengendalian risiko yang efektif menunjukkan perlunya peningkatan pengawasan dan pembaruan prosedur operasional untuk mengurangi kecelakaan.

d. Metode atau Cara Kerja

Untuk mengurangi tindakan tidak aman oleh pekerja, langkah-langkah seperti *induction*, *Tool Box Meeting (TBM)*, dan pelatihan rutin diterapkan. Namun, pengawasan dan konsistensi dalam pelaksanaan, terutama terkait *safety morning talk*, *induction* untuk tamu, dan kepatuhan pekerja terhadap SOP, masih perlu diperkuat.

2. Komponen Proses

a. Komitmen dan Kebijakan K3

Komunikasi kebijakan K3 kepada pihak eksternal belum optimal, berisiko menurunkan pemahaman dan kepatuhan terhadap keselamatan. Selain itu, pelanggaran penggunaan APD oleh pekerja menunjukkan celah dalam implementasi kebijakan K3.

b. Perencanaan K3

Perencanaan K3 pada Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang telah dilakukan dengan menggunakan metode HIRADC dan penyusunan HSE Plan. Namun, pelaksanaan tidak selalu konsisten, terutama dalam pengendalian risiko dan penggunaan APD. Kurangnya pengawasan dan konsistensi dalam implementasi mengurangi efektivitas sistem K3.

c. Pelaksanaan K3

Dalam pelaksanaan K3, masih ada pekerja yang tidak menggunakan APD. Pelaporan kecelakaan juga tidak sepenuhnya mengikuti prosedur, karena kecelakaan ringan sering kali tidak dicatat. Penerapan sistem sanksi dan penghargaan belum konsisten, dan sanksi yang diberikan cenderung kurang tegas dalam menangani pelanggaran.

d. Pemantauan dan Evaluasi K3

Pelaksanaan audit seringkali tidak sesuai jadwal karena adanya penyesuaian melalui addendum, sehingga audit tidak dapat dilakukan tepat waktu.

e. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja

Pelaksanaan peninjauan ulang SMK3 di Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang masih kurang konsisten dan tidak tepat waktu, Ketidaksesuaian ini menghambat identifikasi risiko dan pengambilan tindakan perbaikan yang tepat, serta mengurangi efektivitas sistem keselamatan kerja secara keseluruhan.

### 3. Output

Penerapan SMK3 di Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang belum sepenuhnya optimal sesuai dengan PP No. 50 Tahun 2012, masih terdapat beberapa tantangan seperti kurang maksimalnya komunikasi kebijakan K3 kepada pihak eksternal, terjadinya insiden kecelakaan ringan, dan perlunya peningkatan pengawasan

penggunaan APD. Selain itu, sistem sanksi dan penghargaan belum konsisten, dan pelaporan kecelakaan kerja belum sepenuhnya mengikuti prosedur.

## 6.2 Saran

Saran dari hasil penelitian penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang adalah sebagai berikut :

1. Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang diharapkan agar segera melengkapi tenaga K3 dengan Ahli Utama K3 Konstruksi dan Ahli Madya K3 Konstruksi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas pengawasan keselamatan kerja di proyek.
2. Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang diharapkan dapat memastikan seluruh tenaga K3 memiliki sertifikasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Melalui kegiatan seperti *survey profiling* terhadap *Project QHSE dan HSE Officer* dengan mengidentifikasi pendidikan, pengalaman kerja, sertifikasi, dan keterampilan pekerja *HSE*.
3. Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang diharapkan dapat meningkatkan pengawasan dalam pemberian APD kepada tamu dan memastikan kelengkapan kotak P3K sesuai standar, agar keselamatan kerja dapat terjamin lebih optimal.
4. Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memastikan konsistensi pelaksanaan *safety morning talk, induction* untuk tamu, serta kepatuhan pekerja terhadap SOP untuk mengurangi tindakan tidak aman.
5. Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang diharapkan agar meningkatkan pengawasan penggunaan APD, memastikan pelaporan kecelakaan sesuai prosedur, serta mempertegas penerapan sistem sanksi dan penghargaan agar lebih konsisten dan efektif dalam menangani pelanggaran.

6. Proyek Pembangunan Pasar Raya Padang diharapkan memastikan jadwal audit yang lebih fleksibel dan terkoordinasi dengan baik, serta membuat rencana cadangan untuk melaksanakan audit meskipun ada penyesuaian addendum, guna menjaga kepatuhan terhadap jadwal yang telah ditentukan.

